	NOMOR SOP	001/UN64/PPID/2020		
JOAPERSAL	TGL. PEMBUATAN	20 Agustus 2020		
(SOC)	TGL REVISI			
	TGL. EFEKTIF			
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	DISAHKAN OLEH	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		(Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I)		
PENGUJIAN KONSEKUENSI	NAMA SOP	SOP Pengujian Konsekuensi		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELA	KSANA:		
<ul> <li>1 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2 UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3 Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik</li> </ul>	Memahami tentang Prosedur Pengujian Konsekuensi     Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik			
<ul> <li>Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Surat Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 209/UN64/KPT/2024 tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Singaperbangsa Karawang</li> </ul>				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
1 SOP Pelayanan Informasi Publik	Formulir Permohonan Informasi Softcopy Permohonan Informasi Perangkat Keras (Hardware ): Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Unsika			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :			
Prosedur Pengujian Konsekuensi adalah Salah Satu Tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pengelolaan Permohonan Informasi pada PPID Universitas Singaperbangsa Karawang tidak berjalan	Dokumen Pengujian Konsekuensi			

## SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

20020											
						Ballet Halls					
<b>)</b>	Strains Protector	Penegra PODI	ffp A.m.	Parisine (FFEE)	Edinadajan	Walte					
	Mengajukan hasil kajian/usulan Informasi Publik yang dikecualikan dan/atau pengubahan klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama	Mulai			Surat pengajuan	1 sampal dengan 3 Hari Kerja	Ajuan permohonan	Pengajuan			
2	Mengajukan permohonan pengujian keonsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan dan/atau pengubahan klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan kepadaatasan PPID untuk selanjutnya ditindak lanjuti dilakukan pertimbangan				Surat pengajuan permohonan	Minimal 2 Hari Kerja	Daft Informasi	Pertimbangan			
3	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya				Draf Informasi	1 sampai dengan 3 Hari Kerja	Daft Informasi	Pertimbangan			
4	Mengkompilasi ke dalam Daftar Informasi Publik yang dikecualikan (DIK)	+			Draf Informasi	1 sampai dengan 3 Hari Kerja	Daft Informasi	Kompilasi DIK			
5	Mengkonsiliyasikan rumusan DIK				Draf Informasi	1 sampai dengan 10 Hari Kerja	Daft Informasi	Koordinasi			
6	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID				Draf Informasi	1 sampai dengan 3 Hari Kerja	Draf Surat Keputusan	Draf Surat Keputusan			
7	Membuat laporan dan menyampaikan kepada atasan PPID			<b>-</b> -	Draf Surat Keputusan	1 sampai dengan 10 Hari Kerja	Draf Surat Keputusan	Laporan			
8	Mengkoordinasikan dengan petugas PPID				Surat Keputusan DIK	1 sampai dengan 3 Hari Kerja	Surat Keputusan DIK	Surat Keputusan DIK			
9	Arsip				-			-			
10	selesai		Selesai		-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			